

**ANALISIS PERBANDINGAN PENDAPATAN PERKAPITA
SEBELUM DAN SETELAH PEMEKARAN
KABUPATEN SIJUNJUNG**

SKRIPSI

*Diajukan Sebagai Salah Satu Prasyarat Memperoleh
Gelar Sarjana Ekonomi Strata Satu (S1)*



Oleh:

RANI PUTRIA DELIANA

NIM : 77869/2006

**PROGRAM STUDI EKONOMI PEMBANGUNAN
FAKULTAS EKONOMI
UNIVERSITAS NEGERI PADANG
2011**

HALAMAN PENGESAHAN LULUS UJIAN SKRIPSI

*Dinyatakan lulus setelah Dipertahankan di Depan Tim Penguji Program Studi
Ekonomi Pembangunan Fakultas Ekonomi Universitas Negeri Padang*

ANALISIS PERBANDINGAN PENDAPATAN PERKAPITA SEBELUM DAN SETELAH PEMEKARAN KABUPATEN SIJUNJUNG

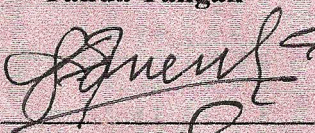
NAMA : Rani Putria Deliana
BP/NIM : 2006/77869
Keahlian : Perencanaan Pembangunan
Program Studi : Ekonomi Pembangunan
Fakultas : Ekonomi

Padang, Februari 2011

Tim Penguji

No.Jabatan	Nama
1. Ketua	: Drs. Akhirmen, M.Si
2. Sekretaris	: Drs. Zul Azhar, M.Si
3. Anggota	: DR. Idris, M.Si
4. Anggota	: DR. Sri Ulfa Sentosa, M.S

Tanda Tangan

1.	
2.	
3.	
4.	

HALAMAN PERSETUJUAN SKRIPSI
ANALISIS PERBANDINGAN PENDAPATAN PERKAPITA
SEBELUM DAN SETELAH PEMEKARAN KABUPATEN SIJUNJUNG

NAMA : RANI PUTRIA DELIANA
TM/NIM : 2006/77869
PROGRAM STUDI : EKONOMI PEMBANGUNAN
FAKULTAS : EKONOMI

Padang, Februari 2011

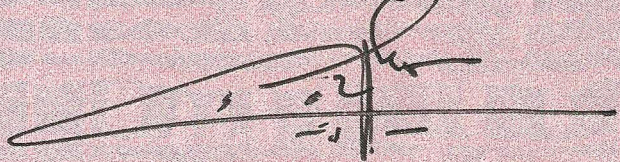
Disetujui Oleh:

Pembimbing I



Drs. Akhirmen, M.Si
NIP. 19621105 198703 1 002

Pembimbing II



Drs. Zul Azhar, M.Si
NIP. 19590805 198503 1 006

Diketahui Oleh :
Ketua Program Studi Ekonomi Pembangunan



Dr. Sri Ulfa Sentosa, M.S
NIP.19610502 198601 2 001

ABSTRAK

Rani Putria Deliana 77869/2006 : Perbandingan Pendapatan Perkapita Sebelum dan Setelah Pemekaran Kabupaten Sijunjung. Skripsi Program Studi Ekonomi Pembangunan Fakultas Ekonomi Universitas Negeri Padang. Dibawah bimbingan Pembimbing I Bapak Drs. Akhirmen, M. Si dan Pembimbing II Bapak Drs. Zul Azhar, M. Si

Tujuan dari penelitian ini yaitu untuk mengetahui dampak dari pemekaran kabupaten Sawahlunto Sijunjung terhadap pendapatan perkapita kabupaten Sijunjung. Bagaimana perbedaan pendapatan perkapita di kabupaten Sijunjung sebelum dan setelah pemekaran. Jadi pemekaran ini sesuai atau tidak sesuai dengan tujuan pemekaran yaitu pemerataan pembangunan dan meningkatkan kesejahteraan masyarakat di daerah.

Jenis penelitian ini adalah deskriptif dan asosiatif. Penelitian deskriptif adalah penelitian yang bermaksud mendeskripsikan variabel-variabel penelitian, sedangkan penelitian asosiatif adalah untuk mempelajari ada atau tidaknya hubungan atau pengaruh antar variabel. Teknik analisis data penelitian ini menggunakan analisis deskriptif dan analisis induktif. Sebelum dianalisis menggunakan uji t, maka dianalisis dulu menggunakan uji prasyarat yaitu uji normalitas sebaran data dan uji homogenitas varians.

Dari hasil penelitian yang dilakukan, diketahui bahwa terdapat perbedaan pendapatan perkapita yang signifikan sebelum dan sesudah pemekaran. Artinya pendapatan perkapita kabupaten Sijunjung mengalami peningkatan setelah pemekaran dilakukan. Dari hasil analisis yang dilakukan maka diperoleh hasil $t_{hitung} -25,876 < t_{tabel} -2,228$ dengan $\alpha = 0,05$ jadi H_0 di tolak dan H_a diterima, jadi pendapatan perkapita sebelum dan setelah pemekaran berbeda secara nyata. Berarti pemekaran kabupaten Sawahlunto Sijunjung dapat meningkatkan pendapatan perkapita kabupaten Sijunjung.

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan maka disarankan kepada pemerintah untuk mengoptimalkan penggunaan sumber daya, peningkatan sarana dan prasarana pelayanan publik, pemberian pelatihan keterampilan kepada masyarakat, dan peningkatan promosi wisata.

KATA PENGANTAR

Puji syukur penulis ucapkan pada ALLAH SWT karena berkah dan karunia-Nya skripsi ini dapat diselesaikan. Kemudian salawat dan salam untuk nabi besar Muhammad SAW atas tauladan dan perjuangannya membawa umatnya ke zaman berilmu pengetahuan seperti sekarang ini.

Skripsi ini berjudul “Perbandingan Pendapatan Perkapita Sebelum dan setelah Pemekaran Kabupaten Sijunjung”. Penulisan skripsi ini bertujuan sebagai salah satu syarat untuk memperoleh gelar Sarjana Ekonomi pada Fakultas Ekonomi Universitas Negeri Padang.

Penyelesaian penulisan skripsi ini tidak terlepas dari bimbingan, bantuan, dorongan, dan dukungan dari berbagai pihak. Oleh karena itu pada kesempatan ini penulis mengucapkan terima kasih yang sedalam-dalamnya kepada Bapak Drs. Akhirmen, M.Si selaku pembimbing I dan Bapak Drs. Zul Azhar, M.Si selaku pembimbing II yang telah memberikan masukan-masukan kepada penulis demi kesempurnaan skripsi ini.

Seiring dengan selesainya penulisan skripsi ini penulis mengucapkan terima kasih kepada :

1. Bapak Dekan Fakultas Ekonomi yang telah membantu penulis dalam menyelesaikan skripsi ini.
2. Ibu Dr. Sri Ulfa Sentosa, M.S dan Bapak Drs. Akhirmen, M.Si selaku ketua dan sekretaris Program Studi Ekonomi Pembangunan yang telah membantu penulis dalam menyelesaikan skripsi ini.

3. Bapak dan Ibu Dosen penguji skripsi yaitu Bapak Dr. Idris, M.Si dan Ibu Dr. Sri Ulfa Sentosa, M.S yang telah memberikan kritik dan saran kepada penulis dalam menyelesaikan skripsi ini.
4. Seluruh dosen, staf pengajar dan pegawai tata usaha Fakultas Ekonomi Universitas Negeri Padang yang telah banyak membantu penulis selama dalam penyelesaian skripsi ini.
5. Bapak Kepala Biro Pusat Statistik Provinsi Sumatera Barat beserta staf yang telah membantu penulis dalam pengambilan data.
6. Kedua orang tua penulis Suparmadi dan Yuliana Ibrahim, MM yang telah memberi kasih sayang, cinta, dukungan baik materil maupun moril serta doa-doanya selama ini.
7. Kak Wulan, Kak Susan, Dina, Da Henki, Bang Romi, dan Laras atas dukungan, doa, dan cinta kalian.
8. Teman masa kecilku sampai sekarang Shinta Yulia Sari, SH atas dukungannya, teman-teman di Basamo Mako Ka Sero (Lidya, Fifi, Ochi, Hilma, Ani, Endar, Aldi, Eji), dan teman-teman masa sekolah terima kasih atas dukungannya.
9. Rekan-rekan seperjuangan di Ekonomi Pembangunan angkatan 2006 yang telah memberikan dorongan moral kepada penulis sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi ini, serta semua pihak yang tidak mungkin disebutkan namanya satu persatu.

Dalam penyusunan dan penulisan skripsi ini penulis menyadari masih banyaknya kekurangan. Untuk itu penulis mengharapkan kritik dan saran yang nantinya dapat menyempurnakan skripsi ini.

Terima kasih yang tidak terhingga kepada semua pihak yang telah membantu penulis, semoga Allah SWT memberikan balasan yang setimpal dan skripsi ini dapat bermanfaat bagi kita semua.

Padang, Januari 2011

Penulis

DAFTAR ISI

	Halaman
HALAMAN JUDUL	
ABSTRAK	i
KATA PENGANTAR	ii
DAFTAR ISI	v
DAFTAR TABEL	vii
DAFTAR GAMBAR	ix
DAFTAR LAMPIRAN	x
BAB I. PENDAHULUAN	
A. Latar Belakang Masalah.....	1
B. Identifikasi Masalah	13
C. Pembatasan Masalah	14
D. Perumusan Masalah	14
E. Tujuan Penelitian	15
F. Manfaat Penelitian	15
BAB II. Kajian Teori, Kerangka Konseptual dan Hipotesis	
A. Kajian Teori	16
1. Teori dan Konsep Pendapatan Perkapita.....	16
2. Teori Wilayah	19
3. Konsep dan Dasar Hukum Pemekaran dan Otonomi Daerah	25
B. Temuan Penelitian Sejenis.....	37
C. Kerangka Konseptual.....	38
D. Hipotesis Penelitian.....	39

BAB III. METODOLOGI PENELITIAN

A. Jenis Penelitian.....	40
B. Tempat dan Waktu Penelitian	40
C. Jenis Data dan Sumber Data	40
D. Teknik Pengumpulan Data	41
E. Definisi Operasional	42
F. Teknis Analisis Data	42

BAB IV. HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

A. Hasil Penelitian	45
1. Gambaran Umum Objek Penelitian	45
2. Analisis Deskriptif Variabel Penelitian	53
3. Analisis Induktif	55
B. Pembahasan	58

BAB V. SIMPULAN DAN SARAN

A. Simpulan	61
B. Saran	62

DAFTAR PUSTAKA

DAFTAR TABEL

Tabel	Halaman
1. Perkembangan PDRB Kabupaten Sijunjung per Lapangan Usaha Sebelum Pemekaran Tahun 1998-2009.....	7
2. Perkembangan PDRB Kabupaten Sijunjung Setelah Pemekaran Tahun 2004-2009.....	8
3. Jumlah Penduduk Kabupaten Sijunjung Sebelum dan Setelah Pemekaran Tahun 1998-2009.....	11
4. Pendapatan Perkapita Kabupaten Sijunjung Sebelum dan Setelah Pemekaran Tahun 1998-2009.....	12
5. Bobot dan Skor Faktor Pemicu dan Kelayakan Pemekaran Daerah menurut Faktor Penentu.....	35
6. Jumlah Penduduk Kabupaten Sijunjung Sebelum Pemekaran Tahun 1998-2003.....	49
7. Jumlah Penduduk Kabupaten Sijunjung Setelah Pemekaran Tahun 2004-2009.....	50
8. PDRB Kabupaten Sijunjung Sebelum Pemekaran Tahun 1998-2003.....	51
9. PDRB Kabupaten Sijunjung Setelah Pemekaran Tahun 2004-2009	52
10. Perkembangan Pendapatan Perkapita Kabupaten Sijunjung Sebelum Pemekaran Tahun 1998-2003	53
11. Perkembangan Pendapatan Perkapita Kabupaten Sijunjung Setelah Pemekaran Tahun 2004-2009	54
12. Hasil Uji Normalitas dengan One Sample Kolmogorov-Smirnov test	56
13. Hasil Uji Homogenitas dengan One Sample Kolmogorov-Smirnov Test	57

14. Uji t Perbedaan Paired Samples Test Sebelum dan Sesudah Pemekaran Kabupaten Sijunjung.....	58
---	----

DAFTAR GAMBAR

Lampiran	Halaman
1. Kerangka Konseptual Analisis Perbandingan Pendapatan Perkapita Sebelum dan Setelah Pemekaran Kabupaten Sijunjung	39

DAFTAR LAMPIRAN

Lampiran	Halaman
1. Data Perkembangan Penduduk Kabupaten Sijunjung Sebelum dan Setelah Pemekaran	65
2. Data PDRB Kabupaten Sijunjung Sebelum dan Setelah Pemekaran	66
3. Data Perkembangan Pendapatan Perkapita Kabupaten Sijunjung Sebelum dan Setelah Pemekaran.....	67
4. Uji Normalitas Sebaran Data	68
5. Uji Homogenitas Varians	69
6. Uji t	69
7. Tabel T	71

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Dampak reformasi yang terjadi di Indonesia ditinjau dari segi politik dan ketatanegaraan adalah terjadinya pergeseran paradigma dan sistem pemerintahan yang bercorak monolitik sentralistik dipemerintah pusat ke arah sistem pemerintahan yang desentralistik (*local democracy*) di pemerintah daerah. Sistem pemerintahan seperti ini memberikan keleluasaan kepada daerah dalam wujud “Otonomi Daerah” yang luas dan bertanggung jawab untuk mengatur dan mengurus kepentingan masyarakat setempat berdasarkan prinsip-prinsip demokrasi, peran serta, prakarsa, dan aspirasi masyarakat sendiri atas dasar pemerataan dan keadilan serta sesuai dengan kondisi, potensi dan keragaman daerah (Koswara, 1998:15).

Seiring dengan dinamika perkembangan masyarakat pada masa reformasi muncul fenomena keinginan masyarakat pada berbagai wilayah untuk membentuk suatu daerah otonom baru, baik daerah propinsi maupun kabupaten dan kota. Keinginan seperti itu didasari oleh berbagai dinamika yang terjadi di daerah baik dinamika politik, ekonomi sosial maupun budaya. Dengan pembentukan daerah otonomi baru, daerah otonom tersebut diharapkan mampu memanfaatkan peluang yang lebih besar dalam mengurus dirinya sendiri, terutama berkaitan dengan pengelolaan sumber-sumber pendapatan asli daerah, sumber daya alam dan pengelolaan bantuan pemerintah pusat kepada daerah otonom dalam rangka

meningkatkan kesejahteraan dan pelayanan kepada masyarakat setempat yang lebih baik. Salah satu aspek yang sangat penting dari pelaksanaan otonomi daerah saat ini adalah terkait dengan pemekaran dan penggabungan wilayah yang bertujuan untuk memperkuat hubungan antara pemerintah daerah dan masyarakat lokal dalam rangka pertumbuhan kehidupan demokrasi. Dengan interaksi yang lebih intensif antara masyarakat dan pemerintah daerah baru, maka masyarakat sipil akan memperoleh hak-hak dan kewajiban-kewajibannya secara lebih baik sebagai warga negara.

Indonesia melakukan reformasi tata pemerintahan sejak diberlakukannya Undang – Undang Nomor 22 tahun 1999 tentang Pemerintahan Daerah yang dalam Pasal 4 ayat (1) menyatakan bahwa: dalam rangka pelaksanaan azas desentralisasi dibentuk dan disusun daerah propinsi, daerah kabupaten dan daerah kota yang berwenang mengatur dan mengurus kepentingan masyarakat setempat menurut prakarsa sendiri berdasarkan aspirasi masyarakat. Pada pasal 4 ayat (2) dinyatakan pula bahwa daerah-daerah sebagaimana yang dimaksud pada ayat (1) masing-masing berdiri sendiri dan tidak mempunyai hubungan hirarkis satu sama lain. Selanjutnya pada pasal 5 ayat (1) disebutkan bahwa daerah dibentuk berdasarkan pertimbangan kemampuan ekonomi, potensi daerah, sosial budaya, sosial politik, jumlah penduduk, luas daerah dan pertimbangan lain yang memungkinkan terselenggaranya otonomi daerah.

Berdasarkan ketentuan-ketentuan tersebut maka dapat dijelaskan bahwa keinginan masyarakat daerah untuk membentuk daerah otonom baru memang dimungkinkan oleh paraturan perundangan yang berlaku.

Dengan demikian maka pembentukan daerah otonom dalam rangka desentralisasi di Indonesia menurut Suwandi (2002:76) memiliki ciri-ciri: (1) daerah otonom tidak memiliki kedaulatan atau semi kedaulatan layaknya di negara federal, (2) desentralisasi dimanifestasikan dalam bentuk penyerahan atau pengakuan atas urusan pemerintahan, (3) penyerahan atau pengakuan urusan pemerintahan sebagaimana dimaksud pada angka 2 tersebut di atas utamanya terkait dengan pengaturan dan pengurusan kepentingan masyarakat setempat (lokalitas) sesuai dengan prakarsa sendiri berdasarkan aspirasi masyarakat.

Sejalan dengan banyaknya keinginan untuk pembentukan daerah otonom baru, baik yang berupa pemekaran maupun peningkatan status, khususnya di daerah kabupaten dan daerah kota sesuai dengan mekanisme pembentukan daerah otonom maka pemerintah telah mengeluarkan Peraturan Pemerintah Nomor 129 Tahun 2000 tentang Persyaratan Pembentukan dan Kriteria Pemekaran, penghapusan dan Penggabungan Daerah, yang isinya antara lain menyebutkan persyaratan, kriteria, prosedur, pembiayaan pemekaran, penghapusan dan penggabungan daerah.

Sejak saat itu berbagai inovatif dan uji coba dilakukan sebagai upaya untuk menyempurnakan pelaksanaan otonomi daerah dan desentralisasi dalam rangka peningkatan pelayanan publik dan penanggulangan kemiskinan secara efektif. Pemerintah pusat mencoba kembali meletakkan arti otonomi daerah pada posisi yang sebenarnya, yaitu bahwa otonomi daerah adalah kewenangan daerah otonom untuk mengatur dan mengurus kepentingan masyarakat setempat menurut prakarsa sendiri berdasarkan aspirasi masyarakat sesuai dengan peraturan

perundangan. Kewenangan daerah tersebut mencakup seluruh bidang pemerintahan, kecuali kewenangan dalam bidang politik luar negeri, pertahanan keamanan, peradilan, moneter dan fiskal, agama, serta kewenangan bidang lain.

Pemekaran dan penggabungan wilayah atau daerah termasuk dalam salah satu reformasi tata pemerintahan tersebut. Pemekaran dilakukan sebagai bentuk dari pemerataan pembangunan, peningkatan kesejahteraan masyarakat di daerah, dan memperkuat hubungan antara pemerintah daerah dengan masyarakat lokal dalam memperoleh hak dan kewajibannya secara lebih baik sebagai warga negara. Kewenangan yang begitu luas tentunya akan membawa konsekuensi-konsekuensi tertentu bagi daerah untuk menjalankan kewenangannya itu. Salah satu konsekuensinya adalah bahwa daerah harus mampu membiayai semua kegiatan pemerintahan dan pembangunan yang menjadi kewenangannya. Sejalan dengan hal tersebut, Koswara (2000:5) menyatakan bahwa daerah otonom harus memiliki kewenangan dan kemampuan untuk menggali sumber - sumber keuangannya sendiri, mengelola dan menggunakan keuangan sendiri yang cukup memadai untuk membiayai penyelenggaraan pemerintahan daerahnya. Ketergantungan kepada bantuan pusat harus seminimal mungkin, sehingga PAD harus menjadi bagian sumber keuangan terbesar, yang didukung kebijakan perimbangan keuangan pusat dan daerah sebagai prasyarat mendasar dalam sistem pemerintahan negara.

Jadi pemekaran daerah secara intensif berkembang di Indonesia sebagai salah satu jalan untuk pemerataan pembangunan dan meningkatkan kesejahteraan masyarakat di daerah. Setelah berjalan lebih dari lima tahun, banyak pihak ragu

apakah tujuan pemekaran tersebut dapat tercapai atau tidak. Meski saat ini pemekaran tidak dapat dielakkan lagi dalam situasi politik yang terjadi namun upaya membangun penilaian yang lebih obyektif akan bermanfaat dalam menentukan arah kebijakan pemekaran selanjutnya.

Pada tanggal 7 Januari 2004 kabupaten Sawahlunto Sijunjung mengalami pemekaran menjadi dua kabupaten yaitu kabupaten Sijunjung dan kabupaten Dharmasraya. Karena pemekaran tersebut, luas wilayah kabupaten induk (kabupaten Sijunjung) berkurang dan jumlah penduduknya pun berkurang. Sehingga pemekaran ini dapat mempengaruhi pendapatan daerah dan pendapatan perkapita penduduk kabupaten induk.

Sebelum pemekaran, kabupaten Sawahlunto Sijunjung mempunyai luas sekitar $\pm 6.091,53 \text{ km}^2$. Sebagian besar mata pencarian penduduknya adalah bertani dan berkebun. Kabupaten Sijunjung (sebelum pemekaran) mempunyai perkebunan sawit yang luasnya 77.000 hektar dan banyak dimiliki oleh swasta yang menghasilkan 873.000 ton tandan buah segar (TBS). Dari 60 persen perusahaan yang mempunyai izin usaha, lebih dari dua pertiga memilih tempat usaha di bagian tenggara kabupaten (kabupaten pemekaran). Karena daerah tenggara merupakan daerah landai yang cocok untuk perkebunan dan banyak tersedia tenaga kerja dari para transmigrasi yang ada disana.

Perkebunan karet juga banyak diusahakan di kabupaten Sawahlunto Sijunjung. Dapat dilihat di sepanjang jalur lintas sumatera tersebar perkebunan karet. Aktifitas perkebunan karet diusahakan oleh rakyat, sehingga tersebar merata di kabupaten ini. Hasil dari sawit dan karet tidak hanya dijual ke propinsi tetangga

tetapi juga telah di ekspor ke luar negeri seperti Singapura, Malaysia, Amerika, Jepang, serta Eropa untuk menjadi bahan baku industri negara tersebut.

Untuk menunjang perkebunan dan pertanian di kabupaten ini, maka dibangun irigasi Batanghari yang merupakan mega proyek Sumatera Barat dengan anggaran Rp. 1,3 triliun. Sehingga sektor pertanian di kabupaten ini menjadi unggulan dengan PAD Rp. 16 miliar. Sebelum irigasi batanghari dibangun, luas areal persawahan sekitar 33.293 hektar dengan produksi 120.500 ton. Dengan pembangunan irigasi ini di harapkan bisa menambah areal persawahan di Sitiung I dan Sitiung II seluas 15.271 hektar. Pembangunan irigasi juga diselaraskan dengan program transmigrasi nasional. Sehingga dapat menyerap tenaga kerja dari para transmigran tersebut.

Hasil lain yang bisa diandalkan adalah produk hutan. Luas hutan di kabupaten Sawahlunto Sijunjung (sebelum pemekaran) sekitar 60 persen dari luas wilayah kabupaten. Produksi kayu bulat dan kayu gergajian hasil empat perusahaan resmi serta hasil hutan non kayu seperti sarang burung walet terus diproduksi. Pada April 2001 hingga Maret 2002, 5.000 meter kubik kayu gergajian dan 31.000 kayu bulat dihasilkan dan dikirim ke pabrik – pabrik kayu lapis di Riau. Hutan produksi lebih banyak dilakukan didaerah tenggara kabupaten (daerah pemekaran) karena daerahnya yang landai dan cocok untuk produksi kayu lapis dan kayu bulat. Pada daerah induk (kabupaten Sijunjung) produksi dari produk hutan hanya dilakukan dalam skala kecil. Karena daerah induk sebagian hutannya merupakan hutan lindung dan tidak boleh untuk produksi.

Tabel 1 : PDRB Kabupaten Sijunjung Sebelum Pemekaran per Lapangan Usaha berdasarkan Harga Konstan 2000 Tahun 1998-2003

No	Lapangan Usaha	1998	1999	2000	2001	2002	2003
1	Pertanian	218.068,8	219.539,13	227.982,56	233.911,02	246.750,48	266.092,42
	Pertumbuhan (%)	-	0,67	3,85	2,6	5,49	7,84
2	Pertambangan dan Penggalian	129.205,1	130.839,78	131.171,34	143.073,33	154.087,58	145.333,8
	Pertumbuhan (%)	-	1,27	0,25	9,07	7,7	-5,68
3	Industri Pengolahan	36.888,95	37.885,78	39.298,51	40.151,29	40.588,94	43.698,05
	Pertumbuhan (%)	-	2,7	3,73	2,17	1,09	7,66
4	Listrik, gas, dan air	4.662,93	5.415,93	6.128,13	6.756,67	7.184,46	7.444,79
	Pertumbuhan (%)	-	16,15	13,15	10,26	6,33	3,6
5	Bangunan	74.771,18	73.509,74	76.386,25	77.784,12	78.064,14	89.734,73
	Pertumbuhan (%)	-	-1,69	3,91	1,83	0,36	14,95
6	Perdagangan, hotel, dan restoran	92.268,71	93.928,76	97.108,44	100.539,14	104.062,72	108.883,7
	Pertumbuhan (%)	-	1,8	3,39	3,53	3,5	4,63
7	Angkutan dan Komunikasi	47.861,68	48.609,09	51.275,86	52.272,98	54.749,64	59.683,01
	Pertumbuhan (%)	-	1,56	5,49	1,94	4,73	9,01
8	Keuangan, persewaan, dan jasa	28.895,06	28.472,74	30.434,19	31.040,35	31.835,56	33.063,14
	Pertumbuhan (%)	-	-1,46	6,89	1,99	2,56	3,86
9	jasa-jasa	136.668,9	139.935,89	146.334,78	153.514,27	160.675,87	165.147,74
	Pertumbuhan (%)	-	2,39	4,57	4,91	4,67	2,78
	Jumlah	769.291,3	778.136,84	806.120,06	839.043,17	877.999,39	919.081,38
	Pertumbuhan (%)	-	1,15	3,6	4,08	4,64	4,68

Sumber : BPS Sumatera Barat, 2010

Dari tabel 1 dapat dilihat bahwa PDRB kabupaten Sijunjung sebelum pemekaran mengalami peningkatan setiap tahunnya. PDRB tertinggi sebelum pemekaran terjadi pada tahun 2003 yaitu meningkat sebesar 4,68 % dan pada

sektor pertanian pendapatan tertinggi yaitu sebesar Rp.266.092,42 juta. Peningkatan ini terjadi akibat lahan pertanian yang bertambah dan dioperasikannya irigasi batang hari. Sehingga produksi pertanian masyarakat meningkat. Tingkat pertumbuhan tertinggi terdapat pada sektor bangunan sebesar 14,95%. Ini terjadi karena kabupaten Sijunjung terus meningkatkan pembangunan untuk mencapai kesejahteraan masyarakat. Kemudian sektor angkutan dan komunikasi meningkat sebesar 9,01%. Pada tahun 2003 sektor pertambangan dan penggalian menurun sebesar 5,68%. Ini karena tambang yang terdapat di kabupaten Sijunjung adalah tambang rakyat dengan output yang sedikit, sehingga banyak tambang batu bara yang bangkrut dan ditutup

Tahun 2002 PDRB kabupaten Sijunjung sebelum pemekaran meningkat sebesar 4,64% dan kontribusi tertinggi masih pada sektor pertanian yaitu sebesar Rp. 246.750,48 juta. Dan kontribusi terendah pada sektor listrik, gas, dan air sebesar Rp. 7.184,46 juta. Pertumbuhan tertinggi terdapat pada sektor pertambangan dan penggalian sebesar 7,7%. Ini terjadi karena banyaknya tambang batu bara yang dibuka di kabupaten Sijunjung. Kemudian sektor listrik, gas, dan air meningkat sebesar 6,33%. Peningkatan yang terendah terdapat pada sektor bangunan yaitu sebesar 0,36%.

Peningkatan PDRB terendah kabupaten Sijunjung sebelum pemekaran terjadi pada tahun 1999 sebesar 1,15%. Terjadi akibat imbas krisis ekonomi yang terjadi pada tahun 1997-1998. Peningkatan tertinggi masih pada sektor pertanian yaitu sebesar Rp. 219.539,13 juta dan terendah pada sektor listrik, gas, dan air sebesar Rp. 5.415,93 juta. Pertumbuhan tertinggi pada tahun 1999 ini terdapat pada sektor

listrik, gas, dan air sebesar 16,15%. Penurunan pendapatan juga terjadi pada tahun ini yaitu pada sektor persewaan, keuangan, dan jasa sebesar 1,46% dan sektor bangunan sebesar 1,69%.

Tabel 2 : PDRB Kabupaten Sijunjung Setelah Pemekaran per Lapangan Usaha berdasarkan Harga Konstan 2000 tahun 2004-2009

No	Lapangan Usaha	2004	2005	2006	2007	2008	2009
1	Pertanian	283.794,2	293.014,7	302.901	306.011,9	320.343,2	337.904,9
	Pertumbuhan (%)	-	3,25	3,37	1,03	4,68	5,48
2	Pertambangan dan Penggalian	151.032,5	167.425,2	173.796,3	194.172,5	205.682,9	221.786,6
	Pertumbuhan (%)	-	10,85	3,81	11,72	5,93	7,83
3	Industri Pengolahan	48.129,03	51.755	55.106,48	59.024,55	63.378,27	66.281,29
	Pertumbuhan (%)	-	7,53	6,48	7,11	7,38	4,58
4	Listrik, gas, dan air	7.965,58	9.302,66	12.790,24	14.215,94	14.681,93	15.720,89
	Pertumbuhan (%)	-	16,79	37,49	11,15	3,28	7,08
5	Bangunan	96.931,46	103.435,6	113.654	117.135,1	123.179,3	129.543,2
	Pertumbuhan (%)	-	6,71	9,88	3,06	5,16	5,17
6	Perdagangan, hotel, dan restoran	113.752,6	117.167,4	124.033,2	130.404,1	137.576,1	143.848,1
	Pertumbuhan (%)	-	3	5,86	5,14	5,5	4,56
7	Angkutan dan Komunikasi	63.370,9	66.609,34	72.740,8	77.911,98	82.221,95	87.264,34
	Pertumbuhan (%)	-	5,11	9,21	7,11	5,53	6,13
8	Keuangan, persewaan, dan jasa	36.703,14	38.209,65	39.533,09	41.466,12	44.435,34	46.370,45
	Pertumbuhan (%)	-	4,1	3,46	4,89	7,16	4,35
9	jasa-jasa	169.861	176.321,7	189.579,4	204.465	214.204,1	224.420,3
	Pertumbuhan (%)	-	3,8	7,52	7,85	4,76	4,77
	Jumlah	971.540,5	1.023.299	1.084.214	1.144.858	1.205.748	1.273.185
	Pertumbuhan (%)	-	5,32	5,95	5,6	5,32	5,6

Sumber : BPS Sumatera Barat, 2010

Pada tabel 2 PDRB kabupaten Sijunjung mengalami peningkatan setiap tahunnya. Pada tahun 2006 pertumbuhan PDRB paling tinggi sebesar 5,95%. PDRB tertinggi terjadi tahun 2009 yaitu sebesar Rp. 1.273.185 juta. Sektor pertambangan dan penggalan memberikan kontribusi tertinggi sebesar 7,83%. Kemudian disusul oleh sektor listrik, gas, dan air sebesar 7,08%. PDRB tertinggi terdapat pada sektor pertanian yaitu sebesar Rp. 337.904,9 juta. Sektor jasa-jasa memberikan kontribusi sebesar Rp. 224.420,3 juta. Kontribusi terendah terdapat pada sektor listrik, gas, dan air sebesar Rp. 15.720,89 juta. Dan pertumbuhan terendah terdapat pada sektor persewaan, keuangan, dan jasa sebesar 4,35%. PDRB terendah setelah pemekaran terjadi pada tahun pertama pemekaran yaitu tahun 2004 sebesar Rp. 971.540,5 juta. Ini terjadi karena banyaknya sumber pendapatan daerah kabupaten Sijunjung berada pada daerah pemekaran.

Pertumbuhan PDRB tertinggi terjadi pada tahun 2006 sebesar 5,95%. Penyesuaian setelah pemekaran telah dilakukan dengan meningkatkan pembangunan. Kontribusi terbesar terdapat pada sektor pertanian yaitu sebesar Rp. 302.901 juta. Sektor pertanian masih tertinggi karena sektor pertanian masih menjadi mata pencaharian masyarakat yang utama. Kemudian disusul oleh sektor pertambangan dan penggalan sebesar Rp. 173.796,3 juta. Kontribusi terendah terdapat pada sektor listrik, gas, dan air sebesar Rp. 12.790,24 juta. Peningkatan tertinggi terjadi pada sektor bangunan sebesar 9,88% dan sektor angkutan dan komunikasi sebesar 9,21%. Peningkatan pembangunan dan perbaikan disektor angkutan dan komunikasi memacu peningkatan pendapatan pada sektor tersebut.

Pertumbuhan PDRB terendah terjadi pada tahun 2005 dan 2008 sebesar 5,32%. Kontribusi terendah masih diberikan oleh sektor listrik, gas, dan air dan kontribusi tertinggi oleh sektor pertanian. Pertumbuhan tertinggi pada tahun 2005 terdapat pada sektor listrik, gas, dan air sebesar 16,79% dan terendah pada sektor pertanian sebesar 2,25%. Sedangkan pada tahun 2008 pertumbuhan tertinggi terdapat pada sektor industri pengolahan sebesar 7,38% dan terendah oleh sektor listrik, air, dan gas sebesar 3,28%.

Tabel 3 : Jumlah Penduduk Kabupaten Sijunjung Sebelum dan Setelah Pemekaran Tahun 1998-2009

Tahun	Jumlah Penduduk Sebelum Pemekaran	Pertumbuhan (%)	Tahun	Jumlah Penduduk Setelah Pemekaran	Pertumbuhan (%)
1998	302.404	-	2004	185.845	-
1999	305.817	1,13	2005	192.991	3,85
2000	310.267	1,46	2006	196.667	1,9
2001	313.744	1,12	2007	199.878	1,63
2002	319.874	1,95	2008	204.601	2,36
2003	321.365	0,47	2009	201.390	-1,57

Sumber : BPS Sumatera Barat, 2010

Pada tabel 3 jumlah penduduk kabupaten Sijunjung sebelum pemekaran terus mengalami peningkatan. Peningkatan tertinggi terjadi pada tahun 2002 sebesar 1,95% dan terendah tahun 2003 sebesar 0,47 %. Setelah pemekaran penduduk kabupaten Sijunjung mengalami penurunan yang cukup tajam sebesar 42,17% karena sebagian besar penduduk kabupaten Sijunjung berada pada daerah pemekaran kabupaten Dharmasraya. Jumlah penduduk kabupaten Sijunjung pada tahun pertama pemekaran sebesar 185.845 jiwa. Setelah pemekaran penduduk kabupaten Sijunjung terus bertambah. Pada tahun 2009 pertumbuhan penduduk

berkurang sebesar 1,57%. Ini diakibatkan banyaknya penduduk yang melakukan migrasi atau pindah ke daerah yang lain, serta keberhasilan program KB yang dilakukan oleh dinas kesehatan. Peningkatan tertinggi terjadi pada tahun 2005 yaitu sebesar 3,85% dan peningkatan terendah terjadi tahun 2007 sebesar 1,63%.

Tabel 4 : Pendapatan Perkapita Kabupaten Sijunjung Sebelum dan Setelah Pemekaran Tahun 1998-2009

Tahun	Pendapatan Perkapita Sebelum Pemekaran	Pertumbuhan (%)	Tahun	Pendapatan Perkapita Setelah Pemekaran	Pertumbuhan (%)
1998	2.543.919,20	-	2004	5.227.692,27	-
1999	2.544.452,43	0,02	2005	5.302.015,38	1,42
2000	2.598.149,53	2,11	2006	5.512.538,40	3,97
2001	2.674.292,32	2,93	2007	5.727.529,64	3,9
2002	2.744.828,87	2,64	2008	5.892.947,49	2,89
2003	2.859.929,92	4,19	2009	6.321.763,74	7,28

Sumber : BPS Sumatera Barat, 2010

Akibat pemekaran pendapatan perkapita kabupaten Sijunjung juga mengalami perubahan. Pada saat sebelum pemekaran pendapatan perkapita kabupaten Sijunjung terus mengalami peningkatan. Peningkatan tertinggi terjadi pada tahun 2003 sebesar 4,19% dan terendah tahun 1999 sebesar 0,02%. Pada saat tahun 1999 peningkatan yang rendah ini merupakan bangkitnya perekonomian kabupaten Sijunjung sebelum pemekaran karena krisis moneter. Kemudian tiap tahunnya terus mengalami peningkatan.

Setelah pemekaran pendapatan kabupaten Sijunjung juga mengalami peningkatan. Peningkatan tertinggi terjadi tahun 2009 yaitu sebesar 7,28%, kemudian tahun 2006 sebesar 3,97%. Peningkatan terendah terjadi pada tahun 2008 sebesar 2,87%.

Pada tahun pertama pemekaran terjadi peningkatan pendapatan perkapita yang cukup tajam yaitu sebesar 82,79%. Ini terjadi karena berkurangnya jumlah penduduk yang sangat drastis dan PDRB yang meningkat.

Setelah terjadinya pemekaran, luas wilayah kabupaten induk (kabupaten Sijunjung) menjadi $\pm 3.130,40 \text{ Km}^2$ dan luas perkebunan dan pertanian menjadi 41.370 hektar. Ini karena sebelum terjadinya pemekaran, produksi pertanian dan perkebunan dikonsentrasikan di daerah tenggara (bakal daerah pemekaran) dan karena hutan di kabupaten induk sebagian besar adalah hutan negara dan hutan lindung. Sehingga tidak bisa digunakan untuk perkebunan dan pertanian dalam skala besar seperti di daerah kabupaten Dharmasraya (kabupaten pemekaran).

Berkurangnya luas daerah kabupaten terutama luas daerah perkebunan dan pertanian di kabupaten Sijunjung berdampak pada pendapatan asli daerah dan pendapatan perkapita penduduknya. Untuk itu penulis tertarik melakukan penelitian dengan judul “ **Analisis Perbandingan Pendapatan Perkapita Sebelum dan Setelah Pemekaran Kabupaten Sijunjung** “.

B. Identifikasi Masalah

Adapun identifikasi masalah yaitu :

1. Bahwa jumlah penduduk berpengaruh terhadap pendapatan perkapita di kabupaten Sijunjung
2. Bahwa jumlah investasi berpengaruh terhadap pendapatan perkapita di kabupaten Sijunjung

3. Bahwa sumber daya alam yang tersedia berpengaruh terhadap pendapatan perkapita di kabupaten Sijunjung
4. Bahwa luas wilayah berpengaruh terhadap pendapatan perkapita kabupaten Sijunjung
5. Bahwa luas lahan pertanian dan perkebunan berpengaruh terhadap pendapatan perkapita kabupaten Sijunjung
6. Bahwa penerimaan pajak daerah berpengaruh terhadap pendapatan perkapita kabupaten Sijunjung
7. Perbedaan pendapatan perkapita sebelum dan setelah pemekaran kabupaten Sijunjung

C. Pembatasan Masalah

Berdasarkan identifikasi masalah di atas, maka permasalahan penelitian ini dibatasi pada satu masalah yaitu perbedaan pendapatan perkapita sebelum dan setelah pemekaran kabupaten Sijunjung.

D. Perumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang di atas, maka rumusan masalah dalam penelitian ini yaitu apakah terdapat perbedaan pendapatan perkapita sebelum dan setelah pemekaran kabupaten Sijunjung?

E. Tujuan Penelitian

Tujuan penelitian ini yaitu menganalisis perbedaan pendapatan perkapita sebelum dan setelah pemekaran kabupaten Sijunjung.

F. Manfaat Penelitian

Penelitian ini diharapkan dapat berguna :

1. Sebagai salah satu syarat untuk memperoleh gelar sarjana Strata Satu (S1) Ekonomi pada Program Studi Ekonomi Pembangunan Fakultas Ekonomi Universitas Negeri Padang.
2. Sebagai sumbangan pemikiran pengembangan bagi ilmu pengetahuan khususnya ilmu ekonomi pembangunan yaitu mengenai teori pendapatan perkapita.
3. Sebagai pengambilan kebijakan bagi pemerintah yaitu pemerintah daerah tingkat II kabupaten Sijunjung.
4. Sebagai bahan masukan peneliti selanjutnya yang meneliti mengenai masalah pendapatan perkapita.

BAB II

KAJIAN TEORI, KERANGKA KONSEPTUAL, DAN HIPOTESIS

A. Kajian Teori

1. Teori dan Konsep Pendapatan Perkapita

Pendapatan perkapita adalah besarnya pendapatan rata-rata penduduk di suatu negara. Pendapatan perkapita didapatkan dari hasil pembagian [pendapatan nasional](#) suatu negara dengan jumlah penduduk negara tersebut. Pendapatan perkapita juga merefleksikan [PDB perkapita](#). Pendapatan perkapita sering digunakan sebagai tolak ukur kemakmuran dan tingkat pembangunan sebuah [negara](#); semakin besar pendapatan perkapitanya, semakin makmur negara tersebut (wikipedia, 2010).

Pendapatan perkapita (percapita income) adalah pendapatan rata-rata penduduk suatu negara pada suatu periode tertentu, yang biasanya satu tahun. Pendapatan per kapita bisa juga diartikan sebagai jumlah dari nilai barang dan jasa rata-rata yang tersedia bagi setiap penduduk suatu negara pada suatu periode tertentu. Pendapatan per kapita diperoleh dari pendapatan nasional pada tahun tertentu dibagi dengan jumlah penduduk suatu negara pada tahun tersebut (Tiara, 2010).

Menurut Badan Pusat Statistik (1999:23) bahwa pendapatan perkapita adalah total perolehan hasil usaha dalam suatu keluarga dibagi jumlah anggota keluarga yang mencakup perbandingan tingkat pengeluaran minimum dan pendapatan minimum perkapita.

Menurut Arsyad (dalam Hemaria, 2008:26) pendekatan pendapatan perkapita mempunyai suatu kelebihan dimana memfokuskan pada *raison d'être* dari pembangunan ekonomi yaitu kenaikan tingkat hidup dan menghilangkan kemiskinan. Jadi apabila pendapatan perkapita meningkat berarti pembangunan ekonomi juga meningkat, tingkat kehidupan naik, dan angka kemiskinan menurun.

Menurut Bahari (dalam Saputra 2002:91) pendapatan adalah penghasilan seseorang baik berupa pendapatan utama maupun pendapatan tambahan. Pemberian balas jasa dalam bentuk gaji atau upah merupakan imbalan sesungguhnya atau pendapatan pokok pekerja yang diberikan perusahaan atas yang dipikulnya, sedangkan intensif merupakan penghasilan tambahan atau fasilitas penunjang lainnya disamping penghasilan pokok.

Ackley (dalam Saputra, 2002:93) Pendapatan seseorang atau individu adalah jumlah penghasilan yang diperoleh dari jasa-jasa produksi yang diserahkannya pada waktu-waktu tertentu atau yang diperoleh dari kekayaan. Pendapatan masyarakat diukur melalui perhitungan rumah tangga, pendapatan rumah tangga adalah merupakan semua pendapatan yang diterima oleh setiap rumah tangga pada jangka waktu tertentu baik dalam bentuk uang tunai maupun dalam bentuk barang. Dengan asumsi pendapatan yang diterima tersebut adalah bersumber dari hasil jasa atau usaha yang dilakukan oleh rumah tangga bersangkutan untuk mengukur kemajuan-kemajuan yang telah dicapai dalam bidang pembangunan ekonomi suatu daerah, maka dilakukan perhitungan Produk Domestik Regional Bruto.

Menurut Meier dalam Kuncoro (2003:13) definisi pembangunan ekonomi adalah suatu proses dimana pendapatan perkapita suatu Negara meningkat selama kurun waktu yang panjang, dengan catatan bahwa jumlah penduduk yang hidup di bawah garis kemiskinan absolute tidak meningkat dan distribusi pendapatan tidak semakin timpang.

Sedangkan menurut Sukirno (2002:26) pendapatan perkapita adalah pendapatan rata – rata penduduk suatu negara pada suatu waktu tertentu. Dalam menghitung pendapatan perkapita dapat dilakukan dengan dua cara yaitu berdasarkan harga berlaku dan harga konstan.

Dari pengertian-pengertian diatas maka pendapatan dapat diartikan sebagai suatu balas jasa yang diwujudkan dalam bentuk gaji atau upah yang merupakan suatu imbalan yang diterima seorang pekerja atas segala jasa yang diberikan kepada instansi atau perusahaan tempat mereka berkerja. Selain itu intensif juga akan diperoleh oleh pekerja diluar gaji pokok yang mereka terima berupa suatu penghasilan tambahan atau fasilitas tunjangan yang diberikan oleh perusahaan.

Menurut Todaro (2003:17) indeks ekonomi lainnya yang digunakan untuk mengukur tingkat kemajuan pembangunan adalah pendapatan perkapita atau GDP perkapita pada dasarnya kemampuan suatu negara untuk memperbesar outputnya dalam laju yang sangat cepat dari tingkat pertumbuhan penduduknya. Sedangkan menurut Sukirno (1994:417) pendapatan perkapita salah satu komponen dan pendapatan nasional yang selalu dilakukan perhitungannya, pendapatan perkapita yaitu rata-rata penduduk suatu Negara pada waktu tertentu dengan jumlah penduduk tahun tersebut

Secara sistematis pendapatan perkapita dapat dirumuskan sebagai berikut:

$$\text{Pendapatan perkapita} = \frac{PNB}{\text{Jumlahpenduduk}}$$

Atau

$$\text{Perkapita PDB} = \frac{PDB}{\text{Jumlahpenduduk}}$$

Dapat disimpulkan bahwa GNP atau GDP per kapita merupakan tolak ukur ekonomis yang paling sering digunakan untuk mengukur sejauh mana kemakmuran ekonomis suatu Negara, yang memungkinkan untuk mengetahui seberapa banyak barang dan jasa yang tersedia bagi rata-rata penduduk untuk melakukan kegiatan konsumsi dan investasi.

2. Teori Wilayah

Hal-hal yang menjadi landasan penting wilayah atau ekonomi regional yaitu (Sjafrizal, 2008:19):

- a. Keuntungan sumber daya alam (*natural resources advantage*)
- b. Penghematan dari pemusatan (*economic of concentration*)
- c. Biaya angkut

Konsep wilayah (region) (Emilia, 2006) didefinisikan sebagai suatu unit geografi yang dibatasi oleh kriteria tertentu dan bagian-bagiannya tergantung secara internal . wilayah dapat dibagi dalam empat jenis :

a. Wilayah homogen

Wilayah homogen adalah wilayah yang dipandang dari aspek atau kriteria mempunyai sifat-sifat atau ciri-ciri yang relatif sama. Sifat-sifat atau ciri-ciri kehomogenan ini misalnya dalam hal ekonomi (seperti daerah dengan struktur produksi dan konsumsi yang homogen, daerah dengan tingkat pendapatan rendah/miskin dll.), geografi seperti wilayah yang mempunyai topografi atau iklim yang sama), agama, suku, dan sebagainya.

Richarson dan Hoover (dalam Emilia, 2006) mengemukakan bahwa wilayah homogen di batasi berdasarkan keseragamannya secara internal (*internal uniformity*). Setiap perubahan yang terjadi pada suatu wilayah tertentu seperti subsidi harga pupuk, subsidi suku bunga kredit, perubahan harga padi dan lain sebagainya kesemuanya akan mempengaruhi seluruh bagian wilayah tersebut dengan proses yang sama. Apa yang berlaku di suatu bagian akan berlaku pula bagian wilayah lainnya.

b. Wilayah Nodal

Wilayah nodal (*nodal region*) adalah wilayah yang secara fungsional mempunyai ketergantungan antara pusat (inti) dan daerah belakangnya (*interland*). Tingkat ketergantungan ini dapat dilihat dari arus penduduk, faktor produksi, barang dan jasa, ataupun komunikasi dan transportasi. Sukirno (Emilia, 2006) dalam menyatakan bahwa pengertian wilayah nodal yang paling ideal untuk di gunakan dalam analisis mengenai

ekonomi wilayah, mengartikan wilayah tersebut sebagai ekonomi ruang yang yang di kuasai oleh suatu atau beberapa pusat kegiatan ekonomi.

Batas wilayah nodal di tentukan sejauh mana pengaruh dari suatu pusat kegiatan ekonomi bila di gantikan oleh pengaruh dari pusat kegiatan ekonomi lainnya. Hoover (dalam Emilia, 2006) mengatakan bahwa struktur dari wilayah nodal dapat di gambarkan sebagai suatu sel hidup dan suatu atom, dimana terdapat inti dan plasma yang saling melengkapi. Pada struktur yang demikian, integrasi fungsional akan lebih merupakan dasar hubungan ketergantungan atau dasar kepentingan masyarakat di dalam wilayah itu, dari pada merupakan homogenitas semata-mata. Dalam hubungan saling ketergantungan ini dengan perantaraan pembelian dan penjualan barang-barang dan jasa-jasa secara lokal, aktifitas-aktifitas regional akan mempengaruhi pembangunan yang satu dengan yang lain.

Wilayah homogen dan nodal memainkan peranan yang berbeda di dalam organisasi tata ruang masyarakat. Perbedaan ini jelas terlihat pada arus perdagangan. Dasar yang biasa digunakan untuk suatu wilayah homogen adalah suatu output yang dapat diekspor bersama dimana seluruh wilayah merupakan suatu daerah surplus untuk suatu output tertentu, sehingga berbagai tempat di wilayah tersebut kecil atau tidak sama sekali kemungkinannya untuk mengadakan perdagangan secara luas di antara satu sama lainnya. Sebaliknya dalam wilayah nodal, pertukaran barang dan jasa secara intern di dalam wilayah tersebut merupakan suatu hal yang mutlak harus ada. Biasanya daerah belakang akan menjual

barang-barang mentah (*raw material*) dan jasa tenaga kerja pada daerah inti, sedangkan daerah inti akan menjual ke daerah belakang dalam bentuk barang jadi.

c. Wilayah Administratif

Wilayah Administratif adalah wilayah yang batas-batasnya di tentukan berdasarkan kepentingan administrasi pemerintahan atau politik, seperti: propinsi, kabupaten, kecamatan, desa/kelurahan, dan RT/RW. Sukirno (dalam Emila, 2006) menyatakan bahwa di dalam praktek, apabila membahas mengenai pembangunan wilayah, maka pengertian wilayah administrasi merupakan pengertian yang paling banyak digunakan. Lebih populernya penggunaan pengertian tersebut di sebabkan dua faktor yakni : (a) dalam kebijaksanaan dan rencana pembangunan wilayah di perlukan tindakan-tindakan dari berbagai badan pemerintahan. Dengan demikian, lebih praktis apabila pembangunan wilayah di dasarkan pada suatu wilayah administrasi yang telah ada, dan (b) wilayah yang batasnya di tentukan berdasarkan atas suatu administrasi pemerintah lebih mudah di analisis, karena sejak lama pengumpulan data di berbagai bagian wilayah berdasarkan pada suatu wilayah administrasi tersebut.

Namun dalam kenyataannya, pembangunan tersebut sering kali tidak hanya dalam suatu wilayah administrasi, sebagai contoh adalah pengelolaan pesisir, pengelolaan daerah aliran sungai, pengelolaan lingkungan dan sebagainya, yang batasnya bukan berdasarkan administrasi namun berdasarkan batas ekologis dan sering kali lintas batas

wilayah administrasi. Sehingga penanganannya memerlukan kerja sama dari suatu wilayah administrasi yang terkait.

d. Wilayah perencanaan

Menurut Boudeville (dalam Emilia, 2006) mendefinisikan wilayah perencanaan (*planning region* atau *programming region*) sebagai wilayah yang memperlihatkan koherensi atau kesatuan keputusan-keputusan ekonomi. Wilayah perencanaan dapat dilihat sebagai wilayah yang cukup besar untuk memungkinkan terjadinya perubahan-perubahan penting dalam penyebaran penduduk dan kesempatan kerja, namun cukup kecil untuk memungkinkan persoalan-persoalan perencanaannya dapat dipandang sebagai satu kesatuan.

Menurut Klassen (dalam Emilia, 2006) mempunyai pendapat yang hampir sama dengan Boudeville, yaitu bahwa wilayah perencanaan harus mempunyai ciri-ciri: (a) cukup besar untuk mengambil keputusan-keputusan investasi yang berskala ekonomi, (b) mampu mengubah industrinya sendiri dengan tenaga kerja yang ada, (c) mempunyai struktur ekonomi yang homogen, (d) mempunyai sekurang-kurangnya satu titik pertumbuhan (*growthpoint*), (e) menggunakan suatu cara pendekatan perencanaan pembangunan, (f) masyarakat dalam wilayah itu mempunyai kesadaran bersama terhadap persoalan-persoalannya.

Teori lokasi penting dalam analisa ekonomi karena pemilihan lokasi yang baik akan dapat memberikan penghematan yang sangat besar untuk ongkos angkut sehingga mendorong terjadinya efisiensi baik dalam bidang produksi maupun pemasaran. Sedangkan interaksi antar wilayah akan dapat mempengaruhi perkembangan bisnis yang nantinya akan mendorong pertumbuhan ekonomi wilayah. Secara garis besar faktor ekonomi utama yang mempengaruhi pemilihan lokasi kegiatan ekonomi sebagai berikut, (Sjafrizal, 2008:21) :

- a. Ongkos Angkut
- b. Perbedaan Upah Antar Wilayah
- c. Keuntungan Aglomerasi
- d. Konsentrasi Permintaan
- e. Kompetisi Antar Wilayah
- f. Harga dan Sewa Tanah

Secara garis besar teori lokasi dapat dikategorikan atas 3 kelompok utama. Pertama, *Least Cost Theory* yang menekankan analisa pada aspek produksi dan mengabaikan unsur-unsur pasar dan permintaan. Pelopor teori ini adalah Alfred Weber (dalam Sjafrizal, 2008:37) yang beranggapan bahwa ada tiga faktor utama yang menentukan pemilihan lokasi perusahaan industri yaitu, ongkos transpor, perbedaan upah buruh dan kekuatan aglomerasi. lokasi optimum dari suatu perusahaan industri umumnya terletak dimana permintaan terkonsentrasi (pasar) atau sumber bahan baku. Alasan yang diberikan adalah bila suatu perusahaan industri memilih lokasi pada salah satu dari kedua tempat tersebut, maka ongkos angkut untuk bahan baku dan hasil produksi akan dapat diminimumkan dan keuntungan aglomerasi yang ditimbulkan dari adanya konsentrasi perusahaan pada suatu lokasi akan dapat pula dimanfaatkan semaksimal mungkin.

Kelompok teori lokasi yang kedua dinamakan *Market Area theory* yang dipelopori oleh August Losch (dalam Sjafrizal, 2008:43), menurut kelompok ini faktor permintaan lebih penting artinya dalam persoalan pemilihan lokasi. Bila permintaan terhadap suatu barang adalah elastis terhadap harga, diperkirakan akan timbul berbagai pengaruh terhadap pemilihan lokasi perusahaan. Di samping itu adanya unsur persaingan antar tempat (*spatial competition*) diantara sesama produsen menentukan pula tingkah laku perusahaan dalam memilih lokasi.

Kelompok teori lokasi ketiga, lazim dinamakan sebagai *Bid Rent Theory* yang dipelopori oleh Von Thunen (dalam Sjafrizal, 2008:26), menurut kelompok ini pemilihan lokasi perusahaan industri lebih banyak ditentukan oleh kemampuan perusahaan yang bersangkutan untuk membayar sewa tanah. Tentunya teori ini lebih banyak berlaku untuk pemilihan lokasi pada daerah perkotaan dimana harga dan sewa tanah sangat tinggi sehingga merupakan bagian ongkos produksi yang cukup menentukan.

Jadi dari uraian diatas dapat disimpulkan bahwa pemekaran wilayah dapat mempengaruhi pendapatan masing-masing. Perbedaan pendapatan tersebut terjadi karena sumber daya alam, upah, dan biaya-biaya yang lainnya berbeda sebelum dan sesudah pemekaran sehingga mempengaruhi pendapatan perkapita.

3. Konsep dan Dasar Hukum Pemekaran dan Otonomi Daerah

Dalam rangka pemerataan pembangunan daerah dan pengembangan wilayah diarahkan pada peningkatan kualitas sumber daya manusia dan pengadaan sarana kebutuhan masyarakat. Pada dasarnya, pemekaran wilayah merupakan salah satu

bentuk otonomi daerah dan merupakan salah satu hal yang perlu diperhatikan karena dengan adanya pemekaran wilayah diharapkan dapat lebih memaksimalkan pemerataan pembangunan daerah dan pengembangan wilayah.

Kata otonomi berasal dari bahasa Yunani yaitu *outonomous*, yang berarti pengaturan sendiri atau pemerintahan sendiri. Otonomi daerah menurut Kamus Istilah Ekonomi (2007:244) yaitu suatu keadaan dimana setiap daerah memiliki kesempatan untuk mengaktualisasikan daerahnya secara optimal, baik individu maupun kelompok masyarakat. Individu otonom adalah manusia yang diberi keleluasaan untuk memunculkan potensi yang dimilikinya secara optimal. Dengan menyelenggarakan otonomi, segala persoalan diserahkan kepada daerah untuk mengidentifikasi, merumuskan, dan memecahkannya (dari, oleh, dan untuk masyarakat daerah) kecuali untuk persoalan dimana daerah tidak dapat menyelesaikannya sendiri dalam konteks keutuhan negara dan bangsa, diserahkan kepada pemerintah pusat untuk menyelesaikannya.

Menurut *Encyclopedia of Social Science* (dalam Sjafrizal, 2008:229) pengertian otonomi adalah *the legal self sufficiency of social body and its actual independence*. Jadi pengertian otonomi menyangkut 2 hal pokok yaitu, kewenangan untuk membuat hukum sendiri (*own laws*) dan kebebasan untuk mengatur pemerintahan sendiri (*self government*). Berdasarkan hal tersebut, maka otonomi daerah merupakan hak atau wewenang untuk mengurus rumah tangga sendiri bagi suatu daerah otonom. Hak dan wewenang tersebut meliputi pengaturan pemerintahan dan pengelolaan pembangunan yang diserahkan oleh pemerintah pusat kepada pemerintah daerah.

Dalam sistem otonomi daerah, dikenal istilah desentralisasi, dekonsentrasi, dan tugas pembantuan. Desentralisasi adalah penyerahan wewenang pemerintahan oleh pemerintah pusat kepada daerah otonomi untuk mengatur dan mengurus urusan pemerintahan dalam sistem Negara Kesatuan Republik Indonesia, Sedangkan dekonsentrasi adalah pelimpahan wewenang pemerintahan oleh pemerintah pusat kepada gubernur sebagai wakil pemerintah pusat di daerah dan/atau kepada instansi vertikal di wilayah tertentu. Sementara itu, tugas pembantuan merupakan penugasan dari pemerintah pusat kepada daerah dan/atau desa dari pemerintah provinsi kepada kabupaten/kota dan/atau desa serta dari pemerintah kabupaten/kota kepada desa untuk melaksanakan tugas tertentu.

Desentralisasi merupakan suatu refleksi proses reformasi politik, sosial budaya dan ekonomi. Perubahan politik dan sosial budaya di Indonesia dengan kecenderungan pergeseran pelayanan publik dari wewenang pemerintah pusat beralih menjadi wewenang tingkat pemerintahan yang lebih dekat dengan masyarakat. Otonomi daerah sebagai wujud pelaksanaan asas desentralisasi dalam penyelenggaraan pemerintahan yang digulirkan oleh pemerintah sebagai jawaban atas tuntutan masyarakat, pada hakekatnya merupakan penerapan konsep *division of power* yang membagi kekuasaan negara secara vertikal (Utomo,1997:35). Dalam konteks ini, kekuasaan akan terbagi antara pemerintah pusat dan pemerintah daerah, yang secara legal konstitusional tetap dalam kerangka negara kesatuan Republik Indonesia.

Untuk mendukung implementasi kebijakan otonomi daerah, Pemerintah Pusat telah mempersiapkan berbagai kebijakan, antara lain Undang-undang Nomor 22

Tahun 1999 tentang Pemerintahan Daerah yang dalam Pasal 4 ayat (1) menyatakan bahwa:

“dalam rangka pelaksanaan azas desentralisasi dibentuk dan disusun daerah propinsi, daerah kabupaten dan daerah kota yang berwenang mengatur dan mengurus kepentingan masyarakat setempat menurut prakarsa sendiri berdasarkan aspirasi masyarakat. Pada pasal 4 ayat (2) dinyatakan pula bahwa daerah-daerah sebagaimana yang dimaksud pada ayat (1) masing-masing berdiri sendiri dan tidak mempunyai hubungan hirarkis satu sama lain. Selanjutnya pada pasal 5 ayat (1) disebutkan bahwa daerah dibentuk berdasarkan pertimbangan kemampuan ekonomi, potensi daerah, sosial budaya, sosial politik, jumlah penduduk, luas daerah dan pertimbangan lain yang memungkinkan terselenggaranya otonomi daerah”.

Kemudian Undang-Undang No 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah mengatur beberapa prasyarat bagi adanya pemekaran wilayah. Syarat tersebut antara lain syarat teknis, fisik kewilayahan, dan administratif. Demikian juga dalam Pasal 5 UU No 32 Tahun 2004 sebagai revisi atas UU No 22 Tahun 1999 menjelaskan mengenai prasyarat administratif, teknis, dan kewilayahan, dalam pengadaan pemekaran suatu wilayah. Demikian juga halnya pada Pasal 4 Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 78 Tahun 2007 (Yuliarto, 2001:14).

Berdasarkan ketentuan-ketentuan tersebut maka dapat dijelaskan bahwa keinginan masyarakat daerah untuk membentuk daerah otonom baru memang dimungkinkan oleh peraturan perundangan yang berlaku.

Dengan demikian maka pembentukan daerah otonom dalam rangka desentralisasi di Indonesia menurut Suwandi (2002:92) memiliki ciri-ciri:

(1) daerah otonom tidak memiliki kedaulatan atau semi kedaulatan layaknya di negara federal, (2) desentralisasi dimanifestasikan dalam bentuk penyerahan atau pengakuan atas urusan pemerintahan, (3) penyerahan atau pengakuan urusan pemerintahan sebagaimana dimaksud pada angka 2 tersebut di atas utamanya terkait dengan pengaturan dan pengurusan kepentingan masyarakat setempat (lokalitas) sesuai dengan prakarsa sendiri berdasarkan aspirasi masyarakat.

Sejalan dengan banyaknya keinginan untuk pembentukan daerah otonom baru, baik yang berupa pemekaran maupun peningkatan status, khususnya di daerah kabupaten dan daerah kota sesuai dengan mekanisme pembentukan daerah otonom maka pemerintah telah mengeluarkan Peraturan Pemerintah Nomor 129 Tahun 2000 tentang Persyaratan Pembentukan dan Kriteria Pemekaran, penghapusan dan Penggabungan Daerah, yang isinya antara lain menyebutkan persyaratan, kriteria, prosedur, pembiayaan pemekaran, penghapusan dan penggabungan daerah.

Dalam Peraturan Pemerintah No. 129 tahun 2000, tentang persyaratan pembentukan dan kriteria pemekaran, penghapusan dan penggabungan daerah, disebutkan bahwa pemekaran daerah berarti pemecahan wilayah daerah yang telah ada dengan mempertimbangkan berbagai faktor di daerah. Pertimbangan faktor – faktor tersebut antara lain : (1) kemampuan ekonomi, (2) potensi daerah, (3) sosial budaya, (4) sosial politik, (5) jumlah penduduk, (6) luas daerah, (7) pertimbangan lain yang memungkinkan terselenggaranya otonomi daerah.

Lebih lanjut Nihin (2000:67), sehubungan dengan pemekaran daerah mengatakan bahwa:

“Aspirasi memekarkan daerah itu atas dasar pertimbangan yang tepat, misalnya dengan pemekaran daerah pusat pemerintahan dan pelayanan semakin dekat dengan masyarakat, partisipasi masyarakat akan bertambah dan lebih intensif dalam kehidupan kemasyarakatan, pemerintahan dan pembangunan didaerahnya. Sedangkan bila timbulnya aspirasi itu lebih karena emosional, primordialisme dan semata-mata hanya ingin menjadi daerah otonom sendiri, tidak atas dasar persyaratan yang tepat, tidak memperhitungkan potensi sumber daya yang ada, akan mempersulit kondisi masyarakat daerah tersebut, dan tidak akan menjamin pengembangan daerah kearah yang lebih baik, bahkan melemahkan tingkat ketahanan wilayah karena akan mendatangkan berbagai beban dan persoalan “.

Dilihat dari luasnya wilayah Negara Indonesia, pemekaran daerah terkait erat dengan kebutuhan daerah yaitu lebih mendekatkan pelayanan kepada masyarakat, mempercepat proses pembangunan, dan melibatkan lebih banyak masyarakat kepada urusan – urusan untuk publik.

Menurut Nanga (1991:29), diakui bahwa otonomi daerah dan juga pemerintah dan pembangunan daerah dapat diwujudkan hanya apabila disertai dengan otonomi keuangan yang efektif. Ini berarti bahwa pemerintah daerah secara finansial haruslah independen terhadap pemerintah pusat dengan jalan sebanyak mungkin menggali sumber-sumber PAD seperti pajak, retribusi dan lain - lain.

Pada prinsipnya hakekat otonomi daerah adalah mempunyai sumber keuangan sendiri, dapat mengelola dan menggunakannya untuk melaksanakan tugas-tugas otonomi serta mempunyai anggaran belanja yang ditetapkan sendiri. Untuk mengetahui apakah suatu daerah otonom itu mampu mengatur dan mengurus rumah tangganya sendiri, Syamsi (1986:199) menegaskan beberapa ukuran atau indikator untuk melihat daerah otonom tersebut mampu mengatur dan mengurus rumah tangganya sendiri, yaitu :

a. Kemampuan Struktural Organisasinya

Struktur organisasi Pemerintah Daerah harus mampu menampung segala aktivitas dan tugas-tugas yang menjadi beban dan tanggung jawabnya, jumlah unit-unit beserta macamnya cukup mencerminkan kebutuhan, pembagian tugas, wewenang dan tanggung jawab yang cukup jelas.

b. Kemampuan Aparatur Pemerintah Daerah

Aparat Pemerintah Daerah harus mampu menjalankan tugasnya dalam mengatur dan mengurus rumah tangga daerahnya. Keahlian, moral, disiplin dan kejujuran saling menunjang tercapainya tujuan yang diidam-idamkan oleh daerah.

c. Kemampuan Mendorong Partisipasi Masyarakat

Pemerintah Daerah harus mampu mendorong agar masyarakat mau berperan serta dalam kegiatan pembangunan.

d. Kemampuan Keuangan Daerah

Pemerintah Daerah harus mampu membiayai semua kegiatan pemerintahan, pembangunan dan kemasyarakatan sebagai pelaksanaan pengaturan dan pengurusan rumah tangganya sendiri. Sumber-sumber dananya apa saja, apakah PAD atau sebagian dari subsidi Pemerintah Pusat.

Jadi, daerah yang melakukan otonomi bisa dikatakan harus bisa mandiri dalam mengatur rumah tangganya sendiri. Tidak ada campur tangan lagi dari daerah induk. Setelah melakukan otonomi, daerah baru atau pun daerah induk harus mampu mengatur organisasinya sendiri, mengatur dan mengurus rumah

tangganya oleh aparaturnya pemerintah masing–masing, membiayai semua kegiatan pemerintahan dengan keuangan dan kemampuan daerah masing – masing, dan tidak ada lagi campur tangan antara daerah pemekaran dengan daerah induk.

Kaho (dalam Syafrizal, 2008:26) menegaskan bahwa faktor yang mempengaruhi pelaksanaan otonomi daerah adalah :

- a. Manusia pelaksanaannya harus baik
- b. Keuangan harus cukup dan baik
- c. Peralatannya harus cukup dan baik
- d. Organisasi dan manajemennya harus baik

Manusia disini adalah masyarakat daerah otonom yang ikut berperan serta dengan baik dalam pembangunan daerah. Kemampuan daerah dalam hal keuangan harus mampu membiayai semua kegiatan pemerintahan, pembangunan dan kemasyarakatan, serta sumber keuangan tersebut secara mandiri. Peralatan atau aset–aset daerah dapat dipenuhi dengan baik untuk membantu kegiatan pemerintahan dan kemasyarakatan. Serta organisasi dan manajemen yang baik yang mampu mengemban tugas–tugas yang diberikan dengan bertanggungjawab.

Pertimbangan yang utama perlu dilakukan dalam menentukan kelayakan pemekaran suatu daerah adalah menyangkut dengan kemampuan keuangan daerah bersangkutan. Alasannya jelas karena pemekaran suatu daerah tidak dapat berjalan dengan baik jika kemampuan keuangan daerah yang bersangkutan tidak memadai, paling tidak untuk membiayai tugas-tugas pokok pemerintahan yaitu menjalankan roda pemerintahan dan melakukan pelayanan publik. Pemekaran daerah tanpa memperhatikan kemampuan keuangan daerah diperkirakan nantinya akan mengalami kesulitan dalam mendorong proses pembangunan dan bahkan

akan sulit untuk menjalankan roda pemerintahan di daerah secara baik. (Blane and Chakery, dalam Sjafrizal 2008:276)

PAD merupakan salah satu sumber keuangan daerah yang terdiri dari penerimaan pajak daerah, retribusi daerah, laba perusahaan, penerimaan dinas-dinas, dan penerimaan yang terus diupayakan peningkatannya. Upaya peningkatan penerimaan pendapatan daerah tersebut merupakan pencerminan dari usaha daerah dalam membiayai kegiatan pemerintahan, pelaksanaan pembangunan daerah, dan pencapaian kesejahteraan bagi masyarakat dalam hal ini peningkatan pendapatan masyarakat.

Secara khusus pemerintah daerah diatur dalam Undang-undang Nomor 22 tahun 1999 tentang Pemerintah Daerah. Namun karena dianggap tidak sesuai lagi dengan perkembangan keadaan ketatanegaraan dan tuntutan penyelenggaraan otonomi daerah maka dibuat aturan baru untuk menggantikannya. Pada tanggal 15 oktober 2004, Presiden Megawati Soekarno Putri mengesahkan Undang-Undang nomor 32 tahun 2004 tentang pemerintahan daerah. Di dalam undang-undang tersebut terdapat definisi otonomi daerah yaitu sebagai berikut :

“Otonomi daerah adalah hak, wewenang, dan kewajiban daerah otonom untuk mengatur dan mengurus sendiri urusan pemerintahan dan kepentingan masyarakat setempat sesuai dengan peraturan perundang-undangan”.

Jadi otonomi daerah bisa dilakukan apabila daerah yang mengalami otonomi harus mampu mengatur dan mengurus rumah tangganya sendiri tanpa banyak campur tangan dari pemerintah pusat.

Kemudian Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 juga mendefinisikan daerah otonomi sebagai berikut :

“Daerah otonom selanjutnya disebut daerah adalah kesatuan masyarakat hukum yang mempunyai batas-batas wilayah yang berwenang mengatur dan mengurus urusan pemerintahan dan kepentingan masyarakat setempat menurut prakarsa sendiri berdasarkan aspirasi masyarakat dalam sistem Negara Kesatuan Republik Indonesia”.

Ada berbagai alasan yang mendorong meningkatnya keinginan untuk melakukan pemekaran daerah. Secara formal keinginan itu dipicu guna meningkatkan jangkauan pelayanan publik, terutama untuk daerah dengan luas cukup besar. Akan tetapi tidak dapat dipungkiri bahwa keinginan untuk melakukan pemekaran daerah tersebut juga dipicu oleh aspek keuangan daerah dan politis. Aspek keuangan muncul sebagai akibat dari perubahan sistem alokasi keuangan negara untuk daerah yang diberlakukan seiring dengan pelaksanaan otonomi daerah (dalam Sjafrizal, 2008:260).

Menurut Sjafrizal (2008:262) faktor pemicu pemekaran dianalisa menggunakan 4 variabel utama yaitu : perbedaan agama, perbedaan etnis (budaya), ketimpangan (*disparitas*) pembangunan ekonomi antar daerah dan luas wilayah. Sedangkan faktor kelayakan pemekaran daerah dianalisa dengan menggunakan 3 variabel yaitu : kemampuan keuangan daerah, pertumbuhan ekonomi daerah, dan kualitas sumber daya manusia daerah.

Untuk dapat melakukan penggabungan semua variabel dari masing-masing faktor pemicu dan kelayakan pemekaran tersebut, metodologi yang digunakan adalah dengan menentukan bobot dan skor dari masing-masing variabel sehingga angkanya dapat dijumlahkan. Untuk melihat bobot dan skor faktor pemicu dan kelayakan pemekaran dapat dilihat pada tabel 3 dibawah ini :

Tabel 5 : Bobot dan Skor Faktor Pemicu dan Kelayakan Pemekaran Daerah Menurut Faktor Penentu

Faktor	Satuan	Interval	Bobot	Skor
A. Pemicu Pemekaran				
1. Ketimpangan Pembangunan Ekonomi Antar Daerah	Indek	< 0,20	30	1
		0,20 - 0,40		2
		> 0,40		3
2. Luas Daerah	Ribu Km ²	< 30,0	30	1
		30,0 – 50,0		2
		>50,0		3
3. Perbedaan Agama	Persen	< 70	20	3
		70 – 90		2
		> 90		1
4. Perbedaan Budaya	Persen	< 70	20	3
		70 – 90		2
		> 90		1
B. Kelayakan Pemekaran				
1. Kemampuan Keuangan Daerah	Persen	< 0,50	40	1
		0,50 – 1,0		2
		> 1,0		3
2. Pertumbuhan Ekonomi Daerah	Persen	< 3,00	30	1
		3,00 – 5,00		2
		> 5,00		3
3. Indeks Pembangunan Manusia (IPM)	Persen	< 65,00	30	1
		65,00 – 70,00		2
		>70,00		3

Untuk faktor pemicu pemekaran daerah, variabel ketimpangan pembangunan ekonomi antar daerah dan luas daerah diberikan bobot lebih besar (30%) dibandingkan dengan variabel perbedaan agama dan etnis yang diberikan bobot 20%. Alasannya karena perbedaan agama dan etnis diperkirakan akan menjadi sensitif jika diikuti oleh ketimpangan pembangunan ekonomi yang selanjutnya akan menimbulkan kecemburuan sosial. Sedangkan luas daerah yang diberikan

bobot lebih besar yaitu 30% karena luas daerah mempunyai implikasi besar terhadap hubungan sosial ekonomi daerah dan kemampuan pemerintah melaksanakan pelayanan publik.

Untuk faktor kelayakan pemekaran daerah, variabel kemampuan keuangan daerah diberikan bobot yang lebih besar yaitu 40% dibandingkan dengan variabel pertumbuhan ekonomi daerah dan kualitas sumber daya manusia daerah dengan bobot 30%. Ini karena kemampuan keuangan daerah diperkirakan akan sangat menentukan tingkat kelayakan pemekaran suatu daerah karena hal ini berpengaruh langsung bagi kemampuan daerah untuk melaksanakan roda pemerintahan dan pelayanan publik yang baik. Sedangkan variabel pertumbuhan ekonomi dan kualitas sumber daya manusia juga merupakan unsur yang penting juga bagi kelayakan pemekaran, tetapi dengan bobot yang lebih rendah yaitu masing-masing 20%.

Skor pada tabel bergerak dari 1 sampai 3 dengan arti bahwa semakin tinggi skor yang diberikan berarti semakin besar pula pengaruhnya terhadap kemungkinan terjadinya pemekaran daerah. Dan jika skor yang diberikan semakin rendah berarti pengaruhnya terhadap pemekaran daerah juga relatif rendah.

Pengambilan kesimpulan tentang besar kecilnya faktor pemicu dan tingkat kelayakan pemekaran daerah tersebut adalah penggabungan nilai variabel yang terdapat pada faktor pemicu dan faktor kelayakan sehingga diperoleh suatu nilai tertentu. Untuk keperluan ini perlu ditetapkan angka konversi dari hasil penggabungan dari beberapa variabel tersebut. Angka konversi yang digunakan sebagai berikut :

- a. Bila jumlah skor yang diperoleh < 200 dapat disimpulkan tidak berpotensi sebagai pemicu pemekaran daerah dan sebaliknya dikatakan berpotensi dan sebaliknya bila jumlah skor diperoleh ≥ 200 .
- b. Konversi yang sama juga berlaku dalam menentukan tingkat kelayakan pemekaran suatu daerah.

4. Temuan Penelitian Sejenis

Hasil penelitian sejenis ini merupakan bagian yang menguraikan tentang beberapa pendapat/hasil penelitian terdahulu yang berkaitan dengan permasalahan yang diteliti. Menurut penelitian Syafrizal (2008:30) melakukan penelitian dengan judul “ Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Penerimaan Pendapatan Asli Daerah (PAD) Kabupaten Singingi Propinsi Riau ”. Dalam penelitiannya disimpulkan bahwa jumlah penduduk dan jumlah investasi berpengaruh secara signifikan terhadap Penerimaan Pendapatan Asli Daerah (PAD) Kabupaten Singingi Propinsi Riau (sig: $0,000 < \alpha = 0,05$). Sumbangan dari kedua variabel bebas dalam penelitian ini terhadap Penerimaan Pendapatan Asli Daerah (PAD) Kabupaten Singingi Propinsi Riau adalah 82,3% berarti 17,7% penerimaan Pendapatan Asli Daerah (PAD) dipengaruhi oleh variabel bebas yang tidak diteliti dengan asumsi *ceteris paribus*.

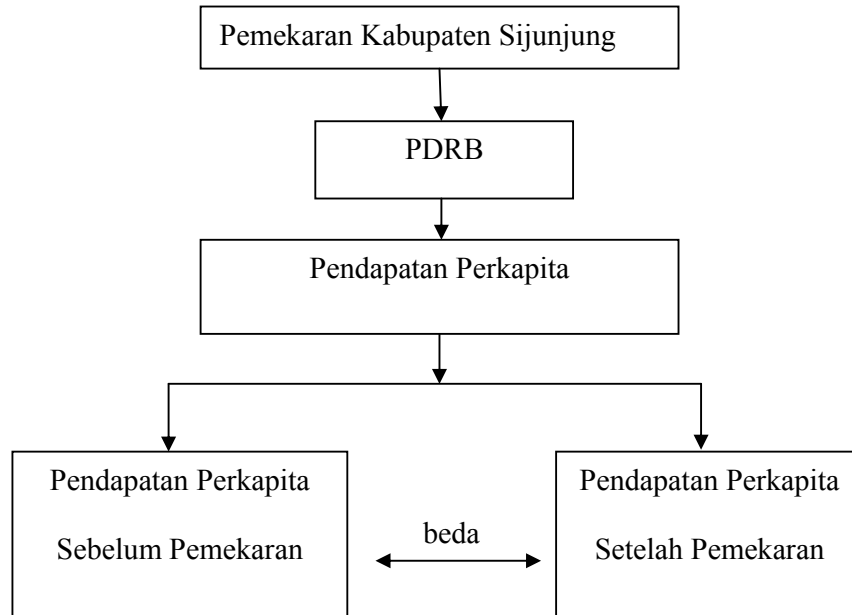
Perbedaan penelitian ini dengan penelitian terdahulu adalah pada penelitian ini penulis lebih mengkhususkan pada analisis perbedaan pendapatan perkapita sebelum dan setelah pemekaran Kabupaten Sijunjung.

5. Kerangka Konseptual

Kerangka konseptual ini dimaksudkan sebagai konsep untuk menjelaskan, mengungkapkan dan menentukan persepsi keterkaitan antara variabel yang diteliti berdasarkan permasalahan. Keterikatan maupun hubungan antara variabel yang diteliti diuraikan dengan berpijak dari teori yang dikemukakan di atas.

Sebagaimana yang telah dikemukakan pada bagian terdahulu, kemajuan daerah otonomi dilihat dari pendapatan perkapita penduduknya. Pada daerah yang mengalami pemekaran, pendapatan perkapita daerahnya tentu akan berubah seiring dengan dilaksanakannya pemekaran tersebut. Daerah pemekaran akan mengalami pengurangan luas wilayah, sumber daya alam, penduduk, dan lainnya yang akan mempengaruhi Pendapatan Asli Daerahnya (PAD) dan juga akan mempengaruhi pendapatan perkapita penduduknya. Pendapatan daerah pemekaran tersebut dapat naik atau turun setelah mengalami pemekaran. Apabila pendapatan perkapitanya naik setelah pemekaran, berarti program pemekaran berhasil meningkatkan kesejahteraan masyarakat, tetapi apabila pemekaran mengakibatkan pendapatan perkapita menurun berarti program pemekaran gagal dan sebaiknya tidak dilaksanakan.

Jadi dampak pemekaran terhadap pendapatan perkapita masyarakat di Kabupaten Sijunjung perbandingannya sebelum dan setelah pemekaran dapat dilihat pada gambar di bawah ini :



Gambar 1 : Kerangka Konseptual Analisis Perbandingan Pendapatan Perkapita Sebelum dan Setelah Pemekaran Kabupaten Sijunjung

6. Hipotesis Penelitian

Berdasarkan masalah yang akan diteliti, maka hipotesis yang diajukan dalam penelitian ini adalah : terdapat perbedaan pendapatan perkapita yang signifikan sebelum dan setelah pemekaran Kabupaten Sijunjung.

$$H_0 : \mu_1 = \mu_2$$

$$H_a : \mu_1 \neq \mu_2$$

BAB V

SIMPULAN DAN SARAN

A. Simpulan

Hasil penelitian terhadap kondisi perkembangan pendapatan perkapita di kabupaten Sijunjung sebelum dan setelah pemekaran menunjukkan bahwa setelah pemekaran kesejahteraan penduduk semakin meningkat seiring dengan meningkatnya pendapatan perkapita. Hal ini diakibatkan kebijakan pemerintah untuk meningkatkan Pendapatan Asli Daerah (PAD).

Sesuai dengan maksud dan tujuan penelitian maka berdasarkan hasil pengamatan dan analisis data yang telah dilakukan maka dapat disimpulkan bahwa terdapat perbedaan pendapatan yang signifikan sebelum dan setelah pemekaran kabupaten Sijunjung ($\text{sig}=0.000 < \alpha=0,05$). Artinya terdapat perbedaan pendapatan perkapita sebelum dan setelah pemekaran sebesar -25,876 satuan atau naik 25,876 satuan setelah pemekaran.

Jadi tujuan pemekaran wilayah tercapai, yaitu pemerataan pembangunan, peningkatan kesejahteraan masyarakat di daerah, dan memperkuat hubungan antara pemerintah daerah dengan masyarakat lokal dalam memperoleh hak dan kewajibannya secara lebih baik sebagai warga negara.

B. Saran

Dengan memperhatikan hasil akhir penelitian ini maka peneliti mengajukan beberapa saran untuk meningkatkan pendapatan perkapita kabupaten Sijunjung sebagai berikut:

1. Pengoptimalan penggunaan sumber daya baik sumber daya alam maupun sumber daya manusia. Sumber daya alam yang terbatas dan sedikit di kabupaten Sijunjung, sebaiknya Pemerintah lebih meningkatkan pendapatannya dibidang yang lain seperti pariwisata alam. Dengan demikian pendapatan masyarakat didekat objek wisata jadi meningkat.
2. Pemerintah kabupaten Sijunjung harus memperhatikan sarana dan prasarana untuk menunjang pelayanan kepada masyarakat, khususnya pembukaan jalan daerah terpencil agar terjadi pemerataan distribusi pendapatan.
3. Memberikan pelatihan dan keterampilan kepada masyarakat khususnya anak-anak putus sekolah, agar mampu mempunyai penghasilan sendiri. Memberikan keterampilan misalnya kerajinan khas Sijunjung seperti batik tanah liat atau makanan khas Sijunjung. Sehingga pendapatan masyarakat meningkat dan otomatis pendapatan perkapita juga meningkat.
4. Meningkatkan promosi wisata yang telah ada dan mengembangkan wisata tersebut dengan meningkatkan fasilitas dan penambahan fasilitas. Agar wisatawan yang berkunjung semakin bertambah.

DAFTAR PUSTAKA

- Arikunto, Suharsimi. 1998. *Prosedur Penelitian*. Jakarta : Rineka Cipta.
- BPS. 2002. *Sumatera Barat dalam Angka. (Berbagai Edisi)* : Padang.
- Eti Rochaety dan Ratih Tresnati. 2007. *Kamus Istilah Ekonomi*. Jakarta : Bumi Aksara.
- Hemaria Eka Putri. 2008. *Hubungan Jumlah Penduduk dan Investasi dengan Pendapatan Perkapita*. Padang : FE UNP (Tidak Dipublikasikan)
- Indonesia. *Undang-Undang Tentang Pemerintahan Daerah*, No. 32 Tahun 2004, LN No. 125 tahun 2004, TLN No. 4437
- Koswara, E. 1998. *Kebijaksanaan Desentralisasi Dalam Rangka Menunjang Pembangunan Daerah, dalam Pembangunan Administrasi Indonesia*. Jakarta : LP3ES
- Kuncoro, Mudrajad. 2002. *Ekonomika Pembangunan (Teori, Masalah, dan Kebijakan)*. Jakarta : PT. Raja Grafindo persada
- Nanga, Muana. 1991. *Makro Ekonomi: Teori, Masalah, dan Kebijakan*. Jakarta : PT. Raja Grafindo Persada.
- Priyatno, Duwi. 2008. *Mandiri Belajar SPSS*. Yogyakarta : MediaKom.
- Saputra, Apriandi. 2002. *Analisis Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Deposito Berjangka di Propinsi Riau*. Skripsi SI, Fakultas Ekonomi Universitas Bung Hatta. Padang. (tidak dipublikasikan).
- Sjafrizal. 2008. *Ekonomi Regional, Teori dan Aplikasi*. Padang : Baduose Media.
- Sudjana. 1997. *Statistika II*. Bandung : Tarsito.
- Sukirno, Sadono. 1994. *Teori Makro Ekonomi*. Jakarta : PT. Raja Grafindo Persada.
- _____ . 2002. *Pengantar Teori Makro*. Jakarta : PT. Raja Grafindo Persada.